

ASPEK POLITIS LUMPUR LAPINDO SIDOARJO TAHUN 2006-2014**AMILINA ROJIBA**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-Mail : amilinarojiba28@gmail.com

Wisnu

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Perusahaan yang berada dalam naungan BPMIGAS adalah PT Lapindo Brantas. Perusahaan ini beroperasi semenjak 1999 di Porong, Sidoarjo. Letak geografis Sidoarjo sangat strategis dalam bidang industri. Pemilik saham terbesar adalah keluarga Aburizal Bakrie. Terjadinya peristiwa lumpur Lapindo pada 29 Mei 2006, telah membawa dampak besar bagi karir politik Aburizal Bakrie. Selain dampak politik, dampak lainnya juga terjadi di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pencalonan Aburizal Bakrie sebagai ketua Partai Golkar membuat warga korban lumpur melakukan berbagai aksi demo. Hal tersebut dilakukan untuk menuntut ganti rugi. Bakrie dinilai lebih mementingkan kepentingan politik daripada nasib korban lumpur yang diakibatkan oleh perusahaannya. Citra Aburizal Bakrie dan Golkar mulai menurun dengan banyaknya aksi demo. Dampak politis dari kasus lumpur Lapindo menjadi fokus utama penelitian.

Rumusan Masalah penelitian ini adalah 1) apa penyebab semburan lumpur, 2) dampak ekonomi, sosial, lingkungan dan politik dari peristiwa lumpur, 3) upaya penanggulangan lumpur Lapindo. Tujuan penelitiannya adalah mengungkap penyebab semburan yang menjadi perdebatan, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya serta mengetahui dampak yang muncul akibat semburan lumpur baik dari segi politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan sejarah. Metode heuristik dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber koran, jurnal, buku dan wawancara. Kritik untuk menyeleksi sumber yang valid. Interpretasi yaitu menghubungkan sumber dengan fakta untuk membuat analisis dan opini penulis, dan historiografi adalah penulisan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah penyebab semburan lumpur menjadi perdebatan, ada dua pendapat yaitu lumpur disebabkan oleh kesalahan prosedur pengeboran yang dilakukan PT Lapindo Brantas atau bencana alam. Meskipun Lapindo menyanggah bahwa penyebab lumpur adalah kesalahan pengeboran, namun pihak Lapindo dibantu pemerintah melakukan tanggungjawab sepenuhnya. Kontroversi terkait karir politik Aburizal Bakrie mulai merembet ke kasus lumpur Lapindo yang belum tuntas. Berbagai aksi demo yang dilakukan oleh korban lumpur terus menerus dilakukan. Sulitnya proses ganti rugi membuat warga melakukan demo untuk menarik simpati publik agar tidak mendukung Bakrie dalam karir politiknya. Unsur politik juga terlihat dari hasil putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa penyebab lumpur karena bencana alam dan pemerintah harus menggunakan dana APBN.

Luapan lumpur Lapindo merusak sebagian infrastruktur ekonomi di Sidoarjo. Kerugian akibat lumpur ditanggung oleh PT Lapindo Brantas, masyarakat dan pemerintah. Semburan lumpur juga menimbulkan masalah sosial dalam pengungsian para korban lumpur. Selain itu, lumpur mengakibatkan lingkungan sekitar rusak tercemar. Pemerintah membuat kebijakan melalui Surat Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden untuk membentuk Timnas dan BPLS dalam upaya penanggulangan lumpur.

Kata Kunci : Aspek Politis, Lumpur Lapindo, Sidoarjo**Abstract**

Companies that are in the shade of BPMIGAS is PT Lapindo Brantas. The company operates since 1999 in Porong, Sidoarjo. The geographical position is very strategic Sidoarjo in industry. The largest shareholder is the Bakrie family. Lapindo mudflow incident on May 29, 2006, had a profound impact on the political career of Bakrie. In addition to political influence, other impacts also occurred in the field of economic, social and environmental.

Bakrie's candidacy as chairman of the Golkar Party makes mudflow victims do various demonstrations. This is done to seek redress. Bakrie rated more concerned with political interests rather than the fate of the victims of the mud

caused by his company. Bakrie and Golkar's image began to decline with many demonstrations. The political implications of the Lapindo mudflow case became a major focus of research.

Problem Formulation of this research are 1) what is the cause of the mudflow, 2) the impact of economic, social, environmental and political events of the mud, 3) reduction of the Lapindo mudflow. The purpose of research is to uncover the causes of bursts that debate, efforts were made to overcome them and to know the impact arising from the mudflow both in terms of political, economic, social and environmental. The method used is the historical approach. Heuristic method is done by collecting a variety of sources of newspapers, journals, books and interviews. Criticism to select a valid source. The interpretation that connects the source with the facts to make an analysis and opinion writers, and historiography is writing.

The results of the study were the cause of the mudflow into the debate, there are two opinions that the mud caused by faulty drilling procedure conducted by PT Lapindo Brantas or natural disasters. Although Lapindo mud argue that the cause is the fault of drilling, but Lapindo assisted the government full responsibility. Controversies regarding political career Bakrie began to creep into the Lapindo case unresolved. Various demonstrations were carried out by the mudflow victims continue to be done. The difficulty of the compensation process makes people do a demo to attract the sympathy of the public not to support Bakrie in his political career. Political element is also evident from the results of a Supreme Court ruling stating that the cause of the mud because of natural disasters and the government should use state budget funds.

Lapindo mudflow damaging some economic infrastructure in Sidoarjo. Losses due to mud covered by PT Lapindo Brantas, society and government. Mudflow also cause social problems in the refugee victims of the mud. In addition, the resulting slurry was broken polluted the surrounding environment. The Government made a policy through a decree of the President and the Presidential Decree to form the national team and BPLS in the response to the mud

Keywords: Political Aspects, Lapindo Mud, Sidoarjo

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan hasil alam yang sangat melimpah. Terdapat banyak sekali hasil alam di tanah Indonesia ini, mulai dari yang dapat dimakan maupun hasil alam yang dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan lainnya. Oleh sebab itu, sejak jaman kerajaan banyak sekali bangsa asing yang berdatangan ke Nusantara untuk mengambil hasil alam dan berusaha menduduki tanah Indonesia. Salah satu hasil alam yang terdapat di Indonesia adalah minyak dan gas bumi.

Gas bumi adalah bahan atau materi yang terdiri dari fosil-fosil dan berbentuk dalam wujud gas.¹ Gas bumi sangat penting sebagai sumber untuk produksi bahan bakar maupun untuk produksi pupuk. Maka dari itu banyak perusahaan-perusahaan industri yang mencari gas bumi dengan berbagai cara. Untuk melindungi gas bumi agar tidak dieksploitasi secara besar-besaran, Indonesia memiliki badan yang membina dan mengawasi kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran minyak maupun gas bumi. Badan tersebut bernama Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS).²

Salah satu perusahaan yang berada dalam naungan BPMIGAS adalah Lapindo Brantas, Inc. Perusahaan ini merupakan perusahaan pertambangan gas bumi dan minyak mentah. Perusahaan ini mulai beroperasi semenjak

tahun 1999 di wilayah Porong Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Letak geografis Sidoarjo sangat strategis dalam bidang industri. Sebab Sidoarjo merupakan jalur yang menghubungkan Surabaya dengan kota-kota industri besar di Jawa Timur seperti Malang, Pasuruan, Gresik dan Mojokerto.³ Potensi alam yang dimiliki Sidoarjo juga mendukung adanya perkembangan industri di bidang pertambangan seperti PT Lapindo Brantas.

Saham Lapindo Brantas dimiliki 100% oleh PT Energi Mega Persada di bawah naungan Grup Bakrie. Grup Bakrie memiliki 63,53% saham Lapindo Brantas, sisanya dimiliki oleh komisaris EMP Rennier A.R. Latief dengan 3,11% saham, Julianto Benhayudi 2,18% saham dan publik 31,18% saham.⁴ Salah satu anggota Grup Bakrie adalah Abu Rizal Bakrie yang merupakan seorang tokoh politik. Bakrie atau Ical sapaan akrabnya, sangat dikenal masyarakat Indonesia karena karir politiknya yang pernah menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Masyarakat dan Menteri Perekonomian. Ketenarannya tidak hanya dalam bidang politik saja, melainkan dalam bidang ekonomi. Tahun 2006 Bakrie tercatat menjadi orang terkaya di Indonesia dalam Majalah Forbes. Bahkan menurut majalah Globe Asia pada tahun 2008 dengan jumlah kekayaan senilai Rp 84,6 triliun, Bakrie merupakan orang terkaya di Asia Tenggara.⁵ Namun titik balik ketenaran Bakrie dalam bidang ekonomi dan politik itu

¹ Yuanita Maria W, *Seluk Beluk Kasus Ledakan Lumpur Lapindo Brantas*, (Malang : Universitas Ma Chung, 2013), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 2.

³ Arief Zuchrizal Madjid, *Analisis Daya Dukung Wilayah Pengembangan Industri Besar dan Sedang Kabupaten Sidoarjo*, (Malang : Universitas Brawijaya, 2014), hlm. 3.

⁴ Indra N. Fauzi, *Dampak Lumpur Porong bagi Perekonomian Jawa Timur*, (Jakarta : REDI, 2007), hlm. 4.

⁵ Angga Aliya, "Kisah Aburizal Bakrie 6 Tahun Jadi Orang Terkaya RI", dalam *Detik* 29 November 2012.

merosot ketika terjadi peristiwa semburan lumpur Lapindo.

Pada 29 Mei 2006 terjadi sebuah peristiwa besar yaitu menyemburnya lumpur panas pada lokasi pengeboran gas bumi di sumur Banjar Panji-1 yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. Lokasi tersebut berada di Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.⁶ Tragedi semburan lumpur yang berwarna hitam pekat ini diikuti oleh ledakan-ledakan disebagian rumah warga sekitar. Lumpur tersebut menyembur setinggi 8 meter dari permukaan tanah dan memiliki suhu yang cukup panas yaitu 60° Celcius. Semburan lumpur panas diperkirakan mengeluarkan lumpur mencapai 100 ribu meter kubik per hari.

Kegiatan pengeboran minyak dan gas yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas merupakan kegiatan survey seistemic dan eksplorasi.⁷ Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan kerana sifat cadangan minyak dan gas bumi yang berada di perut bumi tidak dapat ditentukan lokasinya secara pasti. Lumpur panas tersebut pada bulan November 2006 telah menutupi sekitar 250 hektar tanah, termasuk tujuh desa, sawah, perkebunan tebu, saluran irigasi dan mengganggu jalur transportasi.⁸

Bencana lumpur Lapindo perlahan-lahan merenggut kehidupan masyarakat sekitar. Adanya semburan lumpur panas dan ledakan dari gas bumi yang merusak rumah membuat warga harus mengungsi. Sejak luapan lumpur beberapa tahun yang lalu, kini telah merubah total wilayah fisik kecamatan Porong Sidoarjo. Daratan yang semula merupakan wilayah pemukiman, pertanian dan wilayah usaha kini berubah menjadi lautan lumpur.⁹ Lumpur tidak hanya mengenai areal pertanian dan permukiman warga tetapi juga mengenai sarana pendidikan dan kantor pemerintahan Porong.

Peristiwa lumpur Lapindo merupakan salah satu bencana besar dan berkepanjangan bagi Bangsa Indonesia khususnya warga Sidoarjo. Hal ini dikarenakan banyaknya kerugian material dan immaterial akibat dampak dari semburan lumpur Lapindo hingga saat ini.¹⁰ Puluhan ribu warga yang sebelumnya hidup tentram kini kehilangan tempat tinggal dan pekerjaannya. Korban lumpur diungsikan ke berbagai tempat pengungsian. Penderitaan tentu saja sangat dirasakan oleh para korban lumpur.

Tragedi lumpur panas bisa dibilang sebagai masalah permanen yang sulit untuk dihindari. Meskipun sudah dibangun tanggul-tanggul penahan lumpur dan ganti rugi kepada para korban, namun ancaman lumpur yang terus menerus menyembur membuat kecemasan bagi warga yang tinggal disekitar tanggul. Bencana ini tentu membawa dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat khususnya warga Sidoarjo. Dampak dari bencana lumpur Lapindo dapat dirasakan dari berbagai aspek kehidupan, seperti dampak ekonomi, sosial, budaya, politik serta lingkungan.

Oleh sebab itu masyarakat korban lumpur Lapindo menuntut ganti rugi kepada pihak PT Lapindo Brantas dan pemerintah atas peristiwa yang menenggelamkan rumah dan perusahaan mereka. Pada tahun 2007 tercatat 25 perusahaan yang tenggelam lumpur Lapindo.¹¹ Permasalahan ganti rugi terhadap perusahaan pun pada 2010 dinyatakan lunas. Namun ganti rugi kepada masyarakat atas rumah dan lahan mereka belum terselesaikan. Muncullah berbagai aksi demo dari para korban yang menuntut hak atas uang ganti rugi mereka.

Tuntutan ganti rugi korban lumpur Lapindo sangat mempengaruhi pamor Aburizal Bakrie selaku pemilik saham PT Lapindo Brantas di mata masyarakat dalam hal politik. Mereka menolak pencalonan Abu Rizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya ([Golkar](#)).¹² Korban Lapindo khawatir apabila Bakrie terpilih menjadi ketua, nasib mereka akan terbengkalai. Warga menganggap bahwa alangkah lebih baik apabila Bakrie berkonsentrasi menuntaskan masalah ganti rugi korban lumpur daripada berurusan dengan politik. Banyak masyarakat yang menilai bahwa Abu Rizal Bakrie tidak berkompeten dalam bidang politik apabila belum menyelesaikan permasalahan dalam kasus lumpur Lapindo. Korban lumpur melakukan berbagai aksi demo agar Bakrie mundur dari pencalonannya. Aksi demo tersebut tentunya menarik perhatian masyarakat Indonesia, sehingga sangat mempengaruhi turunnya kepercayaan masyarakat kepada Bakrie.

Seiring dengan berbagai permasalahan bencana lumpur Lapindo, pemerintah tutun tangan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan kebijakan sebagai upaya penanggulangan lumpur. Kebijakan tersebut adalah Kepres No. 13 Tahun 2006 dan Kepres No.

⁶ Muhammad Mirdasy, *Bernafas dalam Lumpur Lapindo*, (Surabaya : MIPP, 2007), hlm. 5.

⁷ Niniek Herawati, *Analisis Risiko Lingkungan Aliran Air Lumpur Lapindo ke Badan Air*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 2-3.

⁸ Laksana Agung Saputra, "Lumpur Panas Meluber ke Jalan", dalam *Kompas*, 02 Juni 2006. Lihat juga *Kompas* 31 Mei 2006 "Semburan Lumpur Cemari Sawah".

⁹ R. Wahyuni Triani, "Local Policy Community Model untuk Merekonstruksi Mitigate Vulnerability dan Disaster Management Plan

dalam *Perspektive Sustainability Penanganan dan Penanggulangan Korban Lapindo*", (Surabaya : Universitas Airlangga, 2009), hlm. 1.

¹⁰ Cisilia Andriani, *Dampak Sosial Bencana Lumpur Lapindo dan Penanganannya di Desa Renokenongo*, (Jawa Timur : UPN Veteran. 2011), hlm : 15.

¹¹ Surat Pengaduan Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo kepada Ketua DPRD Jawa Timur pada 18 Maret 2007.

¹² Achmad Faizal, "Korban Lumpur Lapindo Tolak Pencalonan Bakrie", dalam *Kompas* 7 Agustus 2009.

5 Tahun 2007 yang mengukuhkan keberadaan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah turut andil dalam penyelesaian masalah lumpur Lapindo. Namun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut dinilai belum mencapai target penyelesaian. Melihat kenyataan tersebut, pemerintah berupaya memperbaiki diri dengan mengeluarkan kebijakan baru melalui Kepres No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.¹⁴ Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tersebut dipandang lebih memiliki peran besar dalam upaya penyelesaian bencana daripada upaya sebelumnya. Meskipun begitu, banyak para korban lumpur yang masih belum puas dan merasa belum adil dalam upaya ganti rugi rumah ataupun sawah mereka yang terendam. Seiring dengan itu, maka perlu program penanganan bencana lanjutan agar semburan lumpur panas bisa berhenti dan tidak menimbulkan keresahan.

Keputusan Presiden tersebut dinilai lebih menguntungkan pihak Lapindo, karena ganti rugi dilakukan secara bertahap sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung di pengadilan. Unsur politik dalam kasus lumpur Lapindo juga terlihat pada putusan MA yang menyatakan bahwa penyebab semburan karena bencana alam. Atas dasar keputusan tersebut, pemerintah kemudian menggunakan APBN untuk menanggulangi dampak lumpur kepada para korban. Putusan MA dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga didukung oleh anggota DPR bahwa penggunaan dana APBN dirasa diperlukan untuk menanggulangi dampak lumpur.

Dalam hal ini, penulis akan mengkaji tentang "Aspek Politis Lumpur Lapindo Sidoarjo tahun 2006-2014". Berdasar pada hal tersebut, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: (1) Penyebab semburan lumpur di Sidoarjo; (2) dampak yang ditimbulkan dari peristiwa lumpur Lapindo terutama dari sisi politik; (3) Bagaimana upaya pemerintah dan pihak PT Lpindo Brantas dalam mengatasi masalah lumpur.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan suatu proses pengujian, dan analisis sumber atau laporan dari masa lampau secara kritis. Tujuan penelitian untuk membuat sebuah rekonstruksi masa lampau secara sistematis maupun obyektif dengan melalui cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta

mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.¹⁵

Prosedur heuristik dilakukan untuk mendapatkan sumber dengan kredibilitas data yang tinggi, baik sumber-sumber original, otentik, primer, serta sekunder. Penelusuran sumber primer dilakukan penulis dengan menelusuri dokumen dan arsip yang tersimpan pada kantor Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan kantor Arsip Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Dalam arsip dan dokumen tersebut terdapat Surat Keputusan Presiden tentang lumpur Lapindo, jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat bencana lumpur, luas wilayah serta tempat apa saja yang terendam lumpur Lapindo.

Pencarian sumber sekunder dilakukan penulis dengan membaca beberapa buku, koran dan hasil penelitian yang membahas peristiwa seputar lumpur Lapindo. Pada pencarian data dari beberapa sumber sekunder penulis memperolehnya dari berbagai perpustakaan, yaitu Perpustakaan Daerah Jawa Timur, Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, Perpustakaan Medayu Agung, dan Perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah Unesa.

Langkah kedua adalah pelaksanaan kritik sejarah yang terbagi menjadi dua bentuk yakni kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern lebih menonjolkan pada originalitas bahan yang dipakai membuat dokumen, seperti sumber yang digunakan penulis berupa artikel pada beberapa koran dan majalah yang terbit antara tahun 2006-2014. Sedangkan kritik intern lebih memperhitungkan kebenaran isi sumber atau dokumen. Fokus utama dari kritik intern adalah berusaha membuktikan bahwa sumber-sumber yang diperoleh dapat dipercaya.

Pada tahap selanjutnya yakni pada tahap interpretasi data dilakukan setelah semua fakta dan data terkumpul dan disusun secara kronologis. Penulis dapat menarik sebuah kesimpulan atau diperoleh makna-makna yang saling berkaitan dari fakta-fakta yang diperoleh mengenai peristiwa lumpur Lapindo. Langkah terakhir adalah historiografi yang merupakan proses terakhir pada penulisan metode penelitian sejarah. Pada tahapan historiografi peneliti mulai melakukan penulisan sejarah secara kronologi, dimulai dengan menulis awal mula semburan lumpur panas, penyebab terjadinya semburan, dampak yang terjadi pada masyarakat dan lingkungan, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menghentikan semburan lumpur. Kemudian hasil dari tulisan ini akan

¹³ Surat Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2006 tentang "Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo" yang ditetapkan pada 8 September 2006 di Jakarta. Dan Surat Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2007 tentang "Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo" yang ditetapkan pada 8 Maret 2007 di Jakarta.

¹⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007 tentang "Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo" yang ditetapkan pada 8 April 2007 di Jakarta.

¹⁵ Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya : Unesa University Press, 2011), hlm. 10-11.

dipublikasikan dan harus bisa dipertanggungjawabkan secara teoritis dan konseptual menurut ilmu sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penyebab Semburan Lumpur Lapindo

Lumpur Lapindo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas bercampur gas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong. Lumpur panas tersebut menyembur sejak 29 Mei 2006 dan sudah menenggelamkan ribuan rumah, ratusan hektar lahan dan puluhan pabrik di tiga kecamatan. Lokasi semburan ini sekitar 12 km sebelah selatan pusat Kota Sidoarjo. Ketika semburan lumpur terjadi pertama kali di sekitar sumur Banjar Panji-1 milik Lapindo, volume lumpur yang keluar masih sekitar 5.000 meter kubik per hari. Lubang semburan terjadi di beberapa tempat disekitar pusat semburan pertama, hingga akhirnya titik-titik semburan itu menjadi satu dan membesar. Penyebab semburan lumpur menjadi perdebatan banyak pihak termasuk Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI).

1. Kesalahan Prosedural Pengeboran

PT Lapindo Brantas melakukan pengeboran sumur selama 3 bulan pada Panji-1 yang terletak di desa Renokenongo, Porong, Sidoarjo. Pengeboran dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kedalaman 10.300 kaki. Ketika mencapai kedalaman 9.297 kaki, terjadilah peristiwa ledakan lumpur yang pertama kali.¹⁶ Pada tanggal 29 Mei 2006 pukul 05.00 terjadi semburan lumpur panas pada areal persawahan Desa Siring yang jaraknya kurang lebih 150 meter barat daya dari sumur Banjar Panji-1 milik PT Lapindo Brantas. Tiga hari kemudian pada tanggal 1 Juni muncul semburan yang berjarak beberapa meter ke arah Timur Laut dari sumur Panji-1 dan keesokan harinya muncul lagi semburan dengan jarak 500 meter dari Sumur Banjar Panji-1.

Rencananya pengeboran dilakukan dengan target formasi Kujung namun pada kenyataannya lokasi tempat pengeboran tidak terdapat formasi Kujung. Pada saat melakukan pengeboran tidak dipasang *casing* dalam lubang sumur, sehingga fluida yang mendapat tekanan naik ke atas dan mengakibatkan semburan lumpur. Hal yang lebih parah adalah fluida ini berusaha mencari jalan lain untuk keluar karena pada lubang sumur sudah ditutup. Semburan fluida tersebut kemudian keluar

dari beberapa tempat di area sekitar sumur seperti sawah dan rawa.

Berdasarkan dokumen rapat teknis PT Lapindo Brantas dan rekanan pada 18 Mei 2006, saat pengeboran mencapai 8.500 kaki PT Medco Energi sebagai induk perusahaan Lapindo telah memperingatkan agar operator pemboran segera memasang selubung pengaman (*casing*). Pada pengeboran yang sudah mencapai kedalaman 9.297 kaki belum dipasang *casing* sebagai prosedur baku pengeboran. *Casing* hanya dipasang sampai kedalaman 3.580 kaki, sisanya dibiarkan bekerja tanpa *casing*.¹⁷

Kekacauan pengeboran sebenarnya sudah terjadi pada Sabtu pagi 27 Mei 2006, saat pengeboran mencapai kedalaman 9.297 kaki, Lapindo mengaku kehilangan lumpur atau *loss*. Ini terjadi karena masuknya lumpur pengeboran yang berfungsi sebagai pelumas, dan mengangkat serpihan batu hasil pengeboran. Kejadian ini ditanggulangi dengan menggunakan LCM (*lost circulation materials*) yang terdiri mineral fiber, mika/plastik dan butiran marbel, kayu, serta kulit biji kapas. Setelah itu, sumur tidak lagi kehilangan lumpur.

Rangkaian alat pengeboran dicabut hingga kedalaman 4.241 kaki. Saat itu, terjadilah letupan gas (*well kick*). Letupan gas dari formasi batuan itu menekan alat pengebor sehingga mendorong lumpur naik ke atas. Pada hari Minggu, 28 Mei 2006, *well kick* itu ditutup dengan *kill mud*, yaitu lumpur berat yang dapat mematikan aliran letupan gas. Lumpur yang memiliki berat jenis tinggi, terbuat dari mineral barit atau hematit lumpur membuat tekanan hidrostatik dan dapat mematikan aliran dalam lubang sumur. Keberadaan *kill mud* membuat sumur yang mengeluarkan gas itu akhirnya tersumbat. Kekacauan pengeboran tersebut untuk sementara waktu dapat diatasi. Pada saat itu juga, Lapindo berusaha mencabut mata bor hingga ke permukaan, tetapi gagal karena terjepit lapisan tanah.

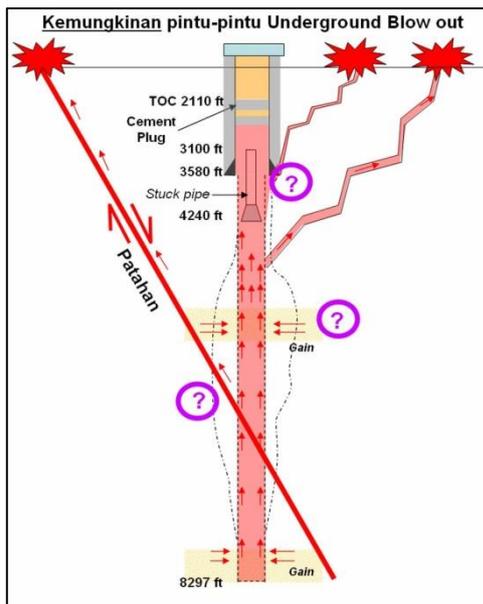
Berdasarkan keterangan Syahdun, mekanik pengeboran dari PT Tiga Musim Mas Jaya, semburan gas dan lumpur disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran. Bor macet saat akan diangkat ke atas untuk mengganti alat. Karena gas tidak bisa naik melalui saluran *fire pit* dalam rangkaian pipa bor, gas kemudian menekan ke samping dan akhirnya keluar ke permukaan melalui rawa.¹⁸ Tanah rawa (persawahan) yang gembur memudahkan gas dari

¹⁶ Yuanita Maria W, *Seluk Beluk Kasus Ledakan Lumpur Lapindo Brantas*, (Malang : Universitas Ma Chung, 2013), hlm. 5.

¹⁷ Ali Azhar Akbar, *Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo*, (Yogyakarta : Galangpress, 2007), hlm. 76.

¹⁸ Laksana Agung Saputra, "Semburan Lumpur Cemari Sawah", dalam *Kompas*, 31 Mei 2006.

dalam bumi keluar dan menyembur dibarengi dengan lumpur berwarna hitam pekat.



Gambar 1. Semburan di Sekitar Sumur BJP-1

Sumber: Dongeng Geologi <http://rovicky.wordpress.com>

Marcelinus, anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) menuduh PT Lapindo Brantas tidak mengantisipasi adanya zona patahan yang ada dalam kawasan eksplorasinya. Patahan itu kini meretakkan struktur geologi sehingga mengakibatkan semburan lumpur. Zona patahan yang lemah itu berupa garis membentang sepanjang Porong (Sidoarjo) hingga Purwodadi (Pasuruan). Posisi patahan miring terhadap utara mata angin dengan sudut N30E (30 derajat dari Utara ke-arah Timur).¹⁹

Teori yang dikembangkan komunitas geologi di antaranya adalah dugaan bahwa lumpur berasal dari deposit minyak dalam bentuk kubah dengan ujung kubah paling dekat permukaan, struktur ini disebut *diapir*.²⁰ Pengeboran Lapindo kemungkinan telah memicu retakan di zona lemah di atas kubah dan menimbulkan *blow out* jebakan lumpur dan gas di dalam kubah. Dengan tekanan tinggi, lumpur dan gas akan mencari lokasi yang paling lemah.

Klaim terhadap kesalahan prosedural pengeboran yang dilakukan oleh pihak PT Lapindo Brantas ini juga sangat disetujui oleh masyarakat, terutama para korban lumpur. Salah satu korban

lumpur Ibu Muawanah menjelaskan bahwa penyebab lumpur memang kesalahan dari pihak Lapindo, mereka sebenarnya ingin mengebor lurus tetapi tidak ada minyak, hingga akhirnya ngebor miring tanpa casing dan keluar lumpur itu.²¹

Pendapat serupa juga dibenarkan oleh saudara Zaenal Abidin yang juga menjadi korban lumpur. Ketika semburan pertama terjadi tahun 2006, Abidin masih berumur 11 tahun. Penyebab semburan lumpur juga diceritakan secara turun temurun oleh para korban lumpur Lapindo. Abidin menjelaskan bahwa sebenarnya pengeboran yang dilakukan Lapindo itu dilokasikan di Desa Siring yang diketahui memiliki banyak sumber minyak. Akan tetapi harga jual tanah di Desa Siring mahal karena padat pemukiman, maka pengeboran dilakukan di area persawahan Desa Renokenongo yang tanahnya lebih murah dan tidak jauh dari Siring. Alat pengeboran Lapindo yang seharusnya lurus di bawah tanah Desa Renokenongo, malah dibelokkan ke Desa Siring, hingga akhirnya terjadi kebocoran gas dan lumpur menyembur.²²

Perijinan yang dilakukan oleh pihak PT Lapindo Brantas juga menjadi salah satu faktor penyebab semburan lumpur. Masyarakat merasa tidak mengetahui bahwa terdapat aktivitas pengeboran di sekitar pemukiman mereka. Pihak Lapindo dinilai lalai dalam melakukan prosedur pengeboran. Pendapat tersebut memunculkan pertanyaan mengapa pihak perusahaan tidak melakukan pemasangan casing pada saat pengeboran. Alasan yang paling dimungkinkan oleh beberapa pihak adalah untuk tujuan penghematan biaya pengeboran.²³

Indikasi penghematan juga terlihat pada terbatasnya persediaan lumpur yang dijadikan sebagai pelumas dan pemberat dalam pengelolaan tekanan dasar sumur untuk menghindari *loss*, *kick*, dan *blow out*. Apabila memang benar terjadi penghematan biaya, patut diduga keras ada motif korupsi di dalamnya. Karena tidak tertutup kemungkinan pada tahap *cost recovery* (pengambilan hasil antara negara dan kontraktor), kontraktor bisa mengklaim biaya produksi yang diantaranya menyangkut casing, cementing, peralatan dan material lumpur. Kasus seperti ini tentu saja terdapat pihak yang disalahkan.

¹⁹ Ali Azhar Akbar, *Op.,cit*, hlm. 79.

²⁰ *Diapir* adalah sebuah lipatan antiklin yang bagain dalamnya berupa lapisan garam, gypsum, lempung, pasir, granit dan lainnya yang menembus tajam dan dapat bergerak.

²¹ Wawancara dengan Ibu Muawanah selaku korban lumpur Lapindo yang bekerja sebagai ojek di atas tanggul, pada 19 Maret 2016.

²² Wawancara dengan Moch. Zaenal Abidin selaku korban lumpur Lapindo, pada 4 April 2016.

²³ Ali Azhar Akbar, *Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo*, (Yogyakarta : Galangpress, 2007), hlm. 161.

Menimbang berbagai kemungkinan, Polisi Daerah Jawa Timur yang didukung penuh oleh Mabes Polri menetapkan enam tersangka. Dua tersangka berinisial WH dan ES merupakan karyawan PT Lapindo Brantas, sementara R, SR dan S adalah karyawan PT Medici Citra Nusa yang merupakan kontraktor Lapindo di sumur BJP-1. Penyelidikan tidak sampai disitu, Direktur Eksplorasi Lapindo, Imam P. Agustino tentunya tidak bisa lepas tangan. Presiden Direktur PT Medici Citra Nusantara, Yeni Nawai selaku kontraktor Lapindo juga pantas dicurigai sebagai tersangka.²⁴ Imam dan Yeni dianggap lalai dalam pengawasan pemasangan casing hingga terjadi semburan yang sulit dikendalikan.

2. Klaim Gempa Yogyakarta

Mengabaikan fakta bahwa PT Lapindo Brantas telah teledor dalam melaksanakan prosedur pengeboran, perusahaan yang 50% sahamnya dikuasai oleh keluarga Bakrie ini mengklaim bahwa *blow out* (semburan) lumpur itu terjadi akibat dari dampak gempa. “Ini akibat gempa Jogjakarta. Geratannya sampai ke Sidoarjo. Memang Sabtu pagi kemarin di Sidoarjo ada lindu (gempa). Mungkin ini yang menyebabkan retakan di ladang gas kami”, tutur Budi Susanto, *relation and security manager* PT Lapindo Brantas.²⁵

Pernyataan itu diperkuat oleh Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Syamsul Mappareppa yang mengatakan bahwa *blow out* terjadi karena adanya gesekan tanah yang diakibatkan oleh gempa dan bukan akibat dari pengeboran minyak.²⁶ Namun pernyataan itu ditepis oleh berbagai kalangan, termasuk oleh Ir. Amien Widodo MT, ahli geologi yang juga Ketua Pusat Studi Bencana LPPM Institut Teknologi Surabaya (ITS). Menurut pandangannya, jika memang karena gempa, semburan bisa dimungkinkan bila gempa bumi di Porong dan sekitarnya mencapai 6 SR. Kenyataannya, efek gempa yang mencapai Porong dan sekitarnya hanya tinggal sekitar 2,2 SR.²⁷ Artinya, *blow out* terjadi karena kelalaian dari pihak operator pengeboran yaitu PT Lapindo Brantas.

Pertemuan ilmiah yang digelar oleh IAGI tentang diskusi keilmuan soal lumpur Lapindo, bekerjasama dengan BPPT, Badan Geologi serta LIPI. Acara tersebut diselenggarakan pada 20-21

Februari 2007 di Jakarta. Pada kesempatan itu, Prof. Mori dari Jepang mengemukakan analisis bahwa memang ada hubungan gempa bumi dengan aktivitas gunung api lumpur bawah tanah. Hal itu dilakukan dengan mengeplot besaran kekuatan gempa bumi dan jarak antara episentrum dengan gunung api lumpur yang diaktifkan.

Teori Prof Mori diperkuat dengan apa yang terjadi pada gunung api pulau Andaman pasca gempa dan Tsunami di Aceh tahun 2004. Jarak antara episentrum gempa di Yogyakarta dengan Porong adalah 259 km. Apabila angka ini dimasukkan ke dalam grafik eksponensial dengan kekuatan gempa Yogyakarta dengan kekuatan 6,3 SR. Maka titik koordinatnya jauh di luar garis grafik. Artinya, dengan kekuatan gempa 6,3 SR tidak akan menimbulkan pengaruh atau kerusakan yang berarti pada jarak 250 km. Apalagi jika kekuatan gempa hanya 5,9 SR.²⁸

Grafik yang dibuat Prof Mori menunjukkan bahwa posisi lumpur Lapindo di Sidoarjo ternyata berada jauh di luar episentrum gempa Yogyakarta. Getaran yang sampai ke Sidoarjo tidak cukup kuat untuk dapat menimbulkan aktivitas gunung api lumpur di bawah tanah.

Berbagai keraguan di seputar anggapan bahwa gempa Yogyakarta sebagai penyebab utama terjadinya semburan lumpur terus berdatangan. Salah satunya Dr. Danny Hilman Natawidjaja dari LIPI, seorang pakar yang sangat berperan dalam penelitian gempa di Aceh. Dr. Danny mempertanyakan mengapa saat gempa terjadi sebelumnya di Pasuruan-Sidoarjo dengan intensitas VIII pada skala MMI tidak menghasilkan gunung api lumpur, sedangkan gempa Yogyakarta yang di Sidoarjo dengan intensitas hanya II-III MMI justru menyebabkan semburan lumpur.²⁹

Demikian pula dengan Dr. Wahyu Triyoso, seismologis dari ITB yang menyatakan bahwa gempa bumi hanya mempunyai efek terhadap perubahan karakteristik *reservoir* (lapisan tempat cadangan minyak dan gas). Dr. Wahyu berpendapat bahwa gempa Yogyakarta tidak mengaktifkan suatu patahan yang dapat menyemburkan lumpur ke permukaan, tetapi hanya meningkatkan tekanan pada *reservoir*. Peristiwa itu pun terjadi setelah datangnya gempa susulan yang berkelanjutan, bukan karena gempa sekali yang terjadi.

²⁴ Mohammad Syarrafah, “Polisi Tetapkan Tersangka Lapindo”, dalam *Tempo*, 27 Juni 2006.

²⁵ Guslan Gumilang, “Gempa Jogja Bocorkan Gas Sidoarjo”, dalam *Jawa Pos*, 30 Mei 2006.

²⁶ Wahyu SD, “Gas Lapindo Bocor, Warga Siring Resah”, dalam *Radarsurabaya*, 30 Mei 2006.

²⁷ Yunanto Wiji Utomo, “Studi Baru Menggugat Teori Penyebab Bencana Lumpur Lapindo”, dalam *Kompas*, 8 Juli 2015.

²⁸ Ali Azhar Akbar, *Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo*, (Yogyakarta : Galangpress, 2007), hlm. 164.

²⁹ Heru Sri Naryanto, Sutopo Nugroho, dkk, *Indonesia diantara Berkah dan Musibah*, (Jakarta : KNRT, 2009), hlm. 32.

Ketua tim perumus pada pembacaan kesimpulan dari pertemuan yang diadakan IAGI tersebut mengemukakan pendapatnya sendiri yang berbeda dari para ilmuwan lainnya. Dijelaskan bahwa terjadinya gunung api lumpur di Sidoarjo memang semata-mata murni bencana alam yang disebabkan rekahan tanah yang dipicu oleh gempa bumi Yogyakarta dan tidak ada hubungannya dengan pengeboran di sumur BJP-1.³⁰ Pertemuan yang diadakan tersebut terlihat bahwa terdapat kepentingan politik didalamnya. Banyak ilmuwan yang menuturkan bahwa gempa Yogyakarta tidak mempengaruhi adanya semburan lumpur di Sidoarjo, namun kesimpulan yang dibacakan oleh pihak IAGI menyatakan hal yang berbeda. Fakta yang seharusnya diungkap sesuai kebenaran dan kaidah keilmuan justru seolah berpihak melindungi kesalahan perusahaan.

b. Dampak Politik Kasus Lapindo

Dampak Politik dalam kasus lumpur Lapindo menjadi sorotan utama dalam kajian ini. Peran salah satu tokoh politik yang juga terlibat dalam kepemilikan saham terbesar di PT Lapindo Brantas sangat berpengaruh. Aburizal Bakrie yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat menyatakan bahwa penanggung jawab lumpur panas adalah pihak PT Lapindo Brantas. Pernyataan tersebut membuat publik semakin simpatik pada Aburizal Bakrie.

Pada kenyataannya, pihak Lapindo mempunyai analisis sendiri bahwa terjadinya semburan lumpur merupakan fenomena alam yang tidak ada sangkut pautnya dengan pengeboran. Mendengar pernyataan pihak Lapindo tersebut, membuat masyarakat menjadi khawatir tentang kejelasan nasib mereka nantinya. Proses ganti rugi yang harusnya segera dituntaskan berjalan lambat karena terdapat banyak perdebatan publik mengenai penyebab lumpur dan penanggungjawabnya. Keterlambatan proses ganti rugi membuat para korban lumpur melakukan aksi demo. Berbagai polemik atas kasus lumpur Lapindo kemudian mempengaruhi keputusan pemerintah dan kiprah politik seorang Aburizal Bakrie.

Karir politik Aburizal Bakrie memuncak ketika terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) di Pekanbaru tahun 2009. Setelah mendapat jabatan sebagai ketua umum partai Golkar, Aburizal Bakrie menjanjikan bahwa Golkar akan memenangkan pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. Di bawah

kepemimpinan Ical, partai Golkar meraih suara sebesar 14,75% dalam pemilihan umum legislatif Indonesia tahun 2014. Pertengahan tahun 2010, hasil liputan media mengindikasikan bahwa Aburizal Bakrie mengincar untuk menjadi kandidat presiden dari partai Golkar dalam pemilu Presiden Indonesia tahun 2014. Setelah itu, Ical berulang kali menyatakan keinginannya untuk pencalonan presiden. Pada kenyataannya, nama Aburizal Bakrie pada pemilu presiden itu tidak tercantum.

Kesuksesan dalam karir bisnis dan politik yang dimilikinya membuat Aburizal Bakrie menjadi figur yang kontroversial di Indonesia. Peristiwa lumpur Lapindo menjadi masalah besar yang harus dihadapinya. Secara tidak langsung, elektabilitas Aburizal Bakrie di mata masyarakat khususnya korban lumpur Lapindo menurun dan merusak citra partai Golkar.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai (DPP) Golkar Akbar Tanjung menilai bahwa kasus luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, tidak hanya akan merusak citra Aburizal Bakrie, yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar. Menurut Akbar, kasus itu juga bisa merusak citra Golkar. Peristiwa luapan lumpur itu terjadi akibat adanya kesalahan dari korporasi Bakrie Group, sehingga kasus ini tidak bisa dilepaskan dari citra Bakrie Grup sebagai korporasi dan Aburizal Bakrie sebagai pemimpinnya.

Posisi Aburizal sebagai ketua umum dan calon presiden yang diusung Partai Golkar membuat kasus Lapindo juga membawa pengaruh bagi partai. Akbar menilai, selama ini Ical tidak bergegas menyelesaikan persoalan Lapindo hingga menjelang pemilu. Padahal citra partai menjadi hal penting dalam pemilu. Rusaknya citra akan membuat kerja kader dan kinerja partai menjadi sia-sia apabila Ical tidak berusaha memperbaikinya.³¹ Aburizal Bakrie juga mengakui bahwa kasus lumpur panas Lapindo akan berdampak negatif bagi Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu 2014, karena proses jual-beli tanah yang belum terselesaikan.

Aburizal Bakrie sebagai tokoh politik seharusnya bisa meyakinkan masyarakat bahwa dirinya layak untuk menjadi seorang pemimpin. Partai Golkar merupakan salah satu partai besar di Indonesia yang sangat identik dengan Aburizal Bakrie. Sejak terjun dalam dunia politik, nama Bakrie semakin dikenal masyarakat. Prestasinya dalam dunia bisnis yang gemilang membuat masyarakat banyak yang mendukung karir politiknya. Namun, sejak peristiwa lumpur Lapindo terjadi, partai Golkar menjadi sasaran para korban lumpur untuk menuntut ganti ruginya. Penuntutan ganti rugi tersebut dilakukan

³⁰ Koesoemadinata R.P, Surat Terbuka kepada Ketua Umum IAGI dalam *Ali Azhar Akbar*, 2007.

³¹ Ihsanuddin, "Akbar Tandjung : Kasus Lumpur Lapindo Rusak Citra Golkar", dalam *Kompas*, 6 Januari 2014.

masyarakat mengingat partai Golkar adalah partai yang dipimpin Aburizal Bakrie.

Pada pemilihan umum ketua Partai Golkar tahun 2014, Aburizal Bakrie kembali terpilih. Namun dalam pemilihan tersebut, terdapat pemimpin partai Golkar lain, yaitu Agung Laksono. Dualisasi kepemimpinan tersebut membuat sebagian masyarakat menilai bahwa partai Golkar hanya dijadikan sebagai alat politik untuk kepentingan pribadi. Selama kepemimpinan Ical, Partai Golkar tidak banyak bicara soal kepentingan rakyat. Partai berlambang beringin itu hanya menjadi alat politik untuk memfasilitasi bisnis kelompok tertentu terutama bisnis keluarganya, *Bakrie & Brother*. Rakyat tentu akan menilai bahwa dibawah kepemimpinan Ical, partai Golkar hanya menjadi beban negara apalagi menyangkut tentang kasus lumpur Lapindo yang telah menguras APBN hingga miliaran rupiah.

Penggunaan uang APBN untuk melunasi ganti rugi korban lumpur Lapindo disetujui oleh Yorrys Raweyai, selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Namun, Yorrys merasa perlu ada pertanggungjawaban yang jelas sehingga bantuan pemerintah tidak memberi keuntungan sepihak untuk pengusaha penanggung jawab PT Lapindo Brantas milik Aburizal Bakrie.³² Hal ini menjadikan masyarakat berspekulasi bahwa partai Golkar yang dipimpin Ical kurang berkompeten dalam kepentingan nasional terutama mensejahterahkan rakyat.

Ketua Lembaga Populi Center, Nico Harjanto, juga menilai bahwa Ical sudah jelas menjadi sosok yang harus bertanggungjawab dibalik kasus lumpur Lapindo. Sangat tidak baik apabila di saat warga menuntut keadilan karena menjadi korban lumpur Lapindo, Ical justru sibuk memikirkan kekuasaannya di Golkar.³³ Jika memang Ical lebih fokus pada persoalan Golkar dan mengabaikan korban Lapindo, maka Ical dinilai tidak layak menjadi tokoh nasional. Aburizal Bakrie lebih baik mundur dari kursi Ketua Umum Golkar dan menyelesaikan lumpur Lapindo. Karena citranya di bidang politik terus merosot seiring dengan lumpur yang terus meluap.

Peristiwa lumpur Lapindo Sidoarjo tahun 2006 memang sangat mempengaruhi citra Aburizal Bakrie. Sebagai figur yang tersohor dalam dunia politik dan bisnis, Ical menjadi sorotan utama ketika semburan lumpur terjadi. Peristiwa ini terjadi karena kesalahan prosedural pengeboran yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Status sebagai pemilik saham terbesar dari PT Lapindo Brantas membuatnya tidak bisa lepas dari ancaman masyarakat yang menuntut ganti rugi kepadanya.

PT Lapindo Brantas yang diwakili Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) Priyo Budi Santoso, yang juga kader Partai Golkar, menyatakan bahwa gempa bumi di Yogyakarta dua hari sebelumnya merupakan pemicu semburan lumpur. Menurut pihak Lapindo, gempa dengan kekuatan 6,3 SR tersebut mengaktifkan kembali patahan yang sebelumnya tidak aktif. Rekahan bawah tanah akibat gempa membuat lumpur bercampur gas menyembur ke permukaan. Lapindo juga mengklaim bahwa aktivitas pengeboran yang dilakukannya tidak terkait dengan semburan. Semburan lumpur panas adalah fenomena alam.³⁴ Apabila hal tersebut benar, maka pihak Lapindo tidak perlu membayar kompensasi kepada warga. Ical yang saat itu menjabat sebagai Menkokesra juga berulang kali menyatakan argumen yang serupa dengan pihak Lapindo.

Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh ahli geologi dari luar negeri bahwa kejadian gempa bumi hanya kebetulan saja. Walaupun gempa tersebut menimbulkan rekahan baru dan melemahkan unsur tanah di sumur pengeboran BJP-1, gempa tidak menyebabkan semburan. Berdasarkan laporan yang dibuat oleh ilmuwan dari Inggris, Amerika, Indonesia dan Australia tersebut menyatakan bahwa peristiwa lumpur Lapindo bukanlah bencana alam, melainkan disebabkan oleh aktivitas pengeboran minyak dan gas. Perbedaan pendapat tersebut membuat masyarakat semakin resah karena ketidakjelasan terkait penyebab semburan lumpur. Warga juga khawatir tentang bagaimana nasib mereka jika masalah ini tidak dituntaskan dengan jelas.

Secara hukum, pada 5 Juni 2006, Medco Energi (salah satu rekan perusahaan PT Lapindo Brantas) mengirim surat yang menuduh bahwa pihak Lapindo telah melanggar prosedur keamanan selama proses penggalian. Segera setelah itu wakil presiden Jusuf Kalla mengumumkan bahwa PT Lapindo Brantas harus membayar kompensasi untuk ribuan korban lumpur. Beberapa eksekutif senior di perusahaan tersebut juga diperiksa karena perusahaan Lapindo dianggap membahayakan nyawa penduduk setempat.

Setelah dinyatakan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, Bakrie Group mengumumkan bahwa mereka akan menjual PT Lapindo Brantas. Badan Pengawas Pasar Modal (BPPM) mencegah hal tersebut karena dirasa Lapindo harus menyelesaikan ganti rugi terlebih dahulu. PT Lapindo Brantas harus membayar sebesar 2,5 triliun rupiah kepada para korban dan sekitar 1,3 triliun untuk usaha menghentikan semburan. Beberapa analisis memperkirakan bahwa Bakrie Group

³² Indra Akuntoto, "Jengah Hadapi Kubu Aburizal Bakrie, Yorrys Wacanakan Hak Lapindo", dalam *Kompas*, 30 Maret 2015.

³³ Erdy Nasrul, "Pengamat : Ical Jangan Abaikan Korban Lapindo", dalam *Republika*, 12 Mei 2015.

³⁴ Nasikun, "Duuuh... DPR Bilang Lumpur Lapindo Fenomena Alam", dalam *Kompas*, 29 September 2009.

akan menyatakan Lapindo bangkrut sehingga tidak harus membayar biaya untuk menghentikan semburan. Aburizal Bakrie menyatakan bahwa tidak akan menghindari hal tersebut dan mencoba menyelesaikan masalah ini dengan membeli lahan yang terkena dampak lumpur. Ical menyetakan dengan tegas bahwa ini bukan uang ganti rugi, melainkan jual-beli karena tidak merasa bersalah dalam kasus semburan lumpur.³⁵

Jika Aburizal Bakrie serius membayar ganti rugi korban Lapindo, seharusnya tidak akan ada keterlambatan dan melakukan peminjaman uang. Aburizal Bakrie dinilai tidak memiliki empati yang besar, pertimbangan bisnis dan ekonomi selalu menjadi pemikiran utamanya. Ical meremehkan penenangan masalah lumpur Lapindo.³⁶ Hal inilah yang menjadi ketakutan bagi masyarakat jika Aburizal Bakrie menjadi Presiden. Ical hanya akan berpikir bisnis dan kekuasaan. Sedangkan rakyat dan nilai kemanusiaan hanya akan menjadi slogan dalam kampanye.

Tuntutan ganti rugi yang tidak segera ditanggapi dengan cepat membuat korban lumpur Lapindo menggelar berbagai aksi demo kembali. Salah satu aksi demo adalah dengan memblokir jalan raya Porong dilakukan oleh beberapa korban lumpur. Kesal tuntutan yang tidak segera dijawab, korban lumpur Lapindo membakar spanduk Partai Golkar yang terpasang di depan tanggul lumpur.³⁷ Menanggapi berbagai aksi demo yang dilakukan oleh korban lumpur, Ical berjanji akan melunasi proses jual-beli tanah pada tahun 2012. Meskipun Ical tetap mengklaim bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas secara hukum.³⁸

Janji Ical untuk melunasi ganti rugi yang belum terealisasi membuat warga lelah menunggu. Enam tahun sejak semburan lumpur pertama terjadi, warga hanya menerima ganti rugi sebesar 20%. Hari Suwandi, korban lumpur Sidoarjo yang berjalan kaki dari Porong menuju Jakarta, menyatakan bahwa dirinya tidak mau bertemu dengan Aburizal Bakrie jika hanya mengemukakan pernyataan berupa janji tanpa ada penyelesaian dalam bentuk ganti rugi secara nyata. Menurutnya, PT Lapindo Brantas kerap kali membuat pernyataan yang selalu diingkari oleh pihak Bakrie sendiri.³⁹

Demonstrasi yang dilakukan oleh warga korban lumpur Lapindo dengan berbagai cara telah menyita

perhatian masyarakat Indonesia. Pencalonan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum partai Golkar (2009) dan sebagai calon Presiden (2014) mendapat penolakan dari banyak pihak. Kasus lumpur Lapindo membuat Ical dituding sebagai pihak yang dipersalahkan dan harus bertanggung jawab. Para korban lumpur akhirnya melakukan aksi demo kembali di atas tanggul dengan tuntutan menolak pencalonan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Apabila Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Golkar, warga khawatir Bakrie akan menggunakan kekuatan politiknya demi mengamankan kepentingannya di Porong. Padahal, masih banyak persoalan ganti rugi korban lumpur yang belum terselesaikan.⁴⁰

Penolakan warga terhadap pencalonan Aburizal Bakrie tidak hanya pada partai Golkar, pencalonannya sebagai Presiden Indonesia membuat masyarakat semakin heboh. Elektabilitasnya sebagai calon presiden dari partai Golkar belum meningkat secara signifikan sejak kasus lumpur Lapindo terjadi. Akbar Tanjung selaku ketua DPP Partai Golkar menyatakan, citra di masyarakat merupakan bagian dari penentuan elektabilitas seseorang. Akbar mengatakan Ical juga bagian dari Grup Bakrie, di mana terdapat berbagai persoalan dalam perusahaan tersebut. Walaupun Aburizal Bakrie sebetulnya tidak lagi terlibat langsung di dalam grup usaha Bakrie tetapi dialah yang membangun dan mengembangkannya.⁴¹

Pemberitaan media yang pro-kontra mengenai kasus lumpur Lapindo dengan pencalonan Aburizal Bakrie menjadikan penilaian masyarakat beragam. Sebagian besar warga korban lumpur tentu menolak pencalonan Bakrie, karena belum menuntaskan masalah ganti rugi. Tuntutan warga korban lumpur seharusnya dijadikan sebagai prioritas utama dalam upaya penyelesaian masalah. Kasus lumpur yang belum selesai sangat mempengaruhi citra Aburizal Bakrie di mata masyarakat.

Sedangkan pemerintah SBY tidak mempermasalahakan apabila Aburizal Bakrie mencalonkan diri sebagai presiden. Banyak spekulasi publik yang menghubungkan bahwa posisi Aburizal Bakrie dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadikan Ical tidak dipersalahkan. Sehingga penanganan terhadap korban lumpur berjalan lambat.⁴² Ketika Wapres Jusuf Kalla menyempatkan diri

³⁵ Sandro Gatra, "Aburizal : Lumpur Tak Jadi Beban", dalam *Kompas*, 27 Desember 2011.

³⁶ Yatimul Ainun "Ditanya Soal Lapindo Ical Tak Mau Berkomentar", dalam *Kompas*, 15 Maret 2012.

³⁷ Ida Saraswati W Sehati, "Korban Lapindo Bakar Spanduk Ical", dalam *Kompas*, 15 Maret 2012.

³⁸ Sandro Gatra, "Ical Janji Akan Selesaikan Lapindo Tahun Ini," dalam *Kompas*, 29 Juni 2012.

³⁹ Aditya Revianur, "Korban Lapindo : Percuma Bertemu Dengan Bakrie", dalam *Kompas*, 24 Februari 2012.

⁴⁰ Sandoro Budi, "Korban Lumpur Lapindo Tolak Pencalonan Bakrie", dalam *Kompas*, 7 Agustus 2009.

⁴¹ Ferdinand Waskita, "Akbar Tanjung : Lapindo Ganjal Kenaikan Elektabilitas Ical", dalam *Kompas*, 9 Agustus 2013.

⁴² Riko Septa, "Presiden SBY Selalu Lindungi Lapindo," dalam *Surabaya Pagi*, 30 Mei 2011.

berkunjung ke pengungsian, dikatakan yang bertanggung jawab terhadap tragedi ini adalah Nirwan Bakrie. Jusuf Kalla juga menuturkan Abrurizal Bakrie tidak akan lari dari kasus ini karena tidak bersalah. Sebagai konsumsi politik, hal itu cukup penting sebagai fakta untuk membangun citra (*image*) seorang tokoh politik yang bermasalah.

Banyak pengamat politik yang menilai bahwa Ical akan kesulitan mendapat simpati rakyat Indonesia jika belum menyelesaikan kasus lumpur. Pencalonannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar saja mendapat banyak ancaman, apalagi jika jadi presiden. Tentu saja masyarakat akan lebih memilih calon presiden yang dinilai mampu mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Aburizal Bakrie, mensejahterahkan warga korban lumpur yang hanya beberapa desa dianggap masih belum mampu. Apalagi mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya Aburizal Bakrie tidak menjadi kandidat calon presiden Indonesia di tahun 2014.

c. Upaya Penghentian Semburan Lumpur

Semburan lumpur panas Lapindo menjadi fokus utama untuk segera dihentikan. Apabila semburan berhenti, maka lumpur tidak akan menimbulkan berbagai masalah selanjutnya. Pada awal terjadinya semburan, terdapat tiga tim ahli yang dibentuk pemerintah untuk menghentikan lumpur dan menanggulangi dampaknya. Tim tersebut bekerja secara paralel, setiap tim terdiri dari perwakilan Lapindo, pemerintah, dan sejumlah ahli dari beberapa universitas terkemuka seperti para pakar dari ITS, ITB dan UGM. Tim ahli tersebut membuat beberapa skenario penghentian semburan dan mencari penyelesaian yang tepat dalam menanggulangi luapan lumpur.

Skenario pertama, menghentikan luapan lumpur dengan menggunakan *snubbing unit* pada sumur Banjar Panji-1. *Snubbing unit* adalah suatu sistem peralatan bertenaga hidrolik yang umumnya digunakan untuk pekerjaan *well-intervention & workover* (melakukan suatu pekerjaan ke dalam sumur yang sudah ada). Skenario kedua dilakukan dengan cara melakukan pengeboran miring (*sidetracking*) menghindari mata bor yang tertinggal tersebut. Pengeboran dilakukan dengan menggunakan rig milik PT Pertamina (Persero). Skenario ketiga, dimulai dari pemadaman lumpur dengan terlebih dulu membuat tiga sumur baru (*relief well*). Namun ketiga skenario tersebut gagal untuk menutup semburan lumpur.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, pihak Lapindo, para ahli dan ilmuwan untuk menghentikan

pusat semburan lumpur. Hingga saat ini upaya yang dilakukan untuk menghentikan pusat semburan lumpur belum ada yang berhasil. Semua pihak hanya bisa menunggu sampai semburan lumpur berhenti dengan sendirinya. Cara lain mengatasi luapan lumpur adalah mengalirkan lumpur ke Sungai Porong yang bermuara di Selat Madura dan membangun tanggul-tanggul penahan agar lumpur tidak semakin meluber dan menimbulkan dampak yang lebih luas.

d. Tindak Pidana Hukum

Mengusut upaya tindakan hukum dalam kasus lumpur Lapindo tentunya tidak lepas dari perdebatan penyebab semburan lumpur. Beberapa kelompok ahli ada yang berpendapat bahwa semburan lumpur Lapindo disebabkan oleh kesalahan eksplorasi yang dilakukan kontraktor yang ditunjuk Lapindo (yang tanggung jawabnya ada di Lapindo) dan ada kelompok ahli yang berpendapat bahwa semburan lumpur Lapindo merupakan fenomena alam *mud volcano* terkait gempa Yogyakarta.

Dua kelompok pendapat ahli tersebut mempengaruhi keputusan penegak hukum. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dalam putusan No. 384/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst. (atas gugatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/YLBHI) menyimpulkan adanya fakta kesalahan dalam pemboran. Bersangkutan dengan pertimbangan hukumnya, Hakim PN Jakarta Pusat tersebut menyatakan bahwa dalam kasus lumpur Lapindo, Majelis sependapat dengan Penggugat dimana luapan lumpur disebabkan karena kekuranghatian pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo (Turut Tergugat) karena belum terpasang casing/pelindung secara keseluruhan sehingga terjadi kick kemudian terjadi luapan lumpur.⁴³

Dalam keputusan tersebut, hakim PN Jakarta Pusat ternyata tidak menghukum Lapindo dan para tergugat lainnya dengan alasan bahwa para Tergugat telah melaksanakan upaya secara optimal dalam memenuhi hak perlindungan korban maupun upaya penghentian semburan lumpur. Sedangkan hakim PN Jakarta Selatan dalam perkara No. 284/Pdt.G/2006/ PN.Jak.Sel. (atas gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia / WALHI) menyimpulkan bahwa semburan lumpur Lapindo tersebut karena fenomena alam.

Keputusan Pengadilan Negeri yang membebaskan pihak Lapindo dari jeratan hukum membuat sebagian masyarakat tidak terima. Meskipun bebas dari hukum, PT Lapindo Brantas tetap berjanji akan bertanggungjawab dan menanggulangi masalah lumpur. Presiden Susilo

⁴³ Subagyo, "Membuka Teka-Teki Penyebab Lumpur", dalam *Blog Pekerja Hukum dan Sosial*, 1 April 2008.

Bambang Yudhoyono sendiri tidak tinggal diam melihat keputusan pengadilan. Presiden meminta seluruh menteri terkait yaitu Gubernur Jawa Timur dan Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) juga ikut menyelesaikan dan menangani kasus lumpur di Sidoarjo. Masyarakat diharapkan tidak memperoleh kerugian apapun atas keputusan tersebut. Presiden menyatakan masalah lumpur harus diselesaikan bersama yang menjadi kewajiban pemerintah pusat, daerah dan pihak Lapindo.⁴⁴

Berbagai tuntutan yang diberikan kepada pihak Lapindo maupun pemerintah ternyata hanya sampai di persidangan. Para tergugat akhirnya dibebaskan tanpa ada jeratan hukum yang melibatkannya. Pihak Lapindo hanya dituntut untuk membayar ganti rugi sampai lunas secepatnya dan melakukan upaya penanggulangan terhadap korban serta luapan lumpur. Pihak pemerintah juga dituntut untuk membantu menyelesaikan pembayaran terhadap tanah dan bangunan warga yang terdampak lumpur sebagaimana tercantum dalam perpres yang telah dibuat.

Peristiwa lumpur Lapindo tersebut diharapkan bisa menjadi contoh kepada perusahaan pertambangan lain di Indonesia agar melakukan eksploitasi berdasarkan standar prosedural yang baku. Sehingga tragedi seperti itu tidak akan terulang kembali dan merugikan banyak pihak. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah menjadi anugerah bagi penduduk Indonesia. Pemanfaatan alam yang baik akan menghasilkan dampak yang positif. Untuk itu pengeksplorasian terhadap alam harus dilakukan dengan bijak agar tidak menimbulkan musibah bagi bangsa.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan-keterangan dan juga fakta yang telah diperoleh berdasarkan sumber-sumber yang berhubungan dengan skripsi berjudul "Aspek Politis Lumpur Lapindo Sidoarjo Tahun 2006-20014", dapat disampaikan beberapa keterangan penting mengenai penyebab semburan lumpur Lapindo, kronologis peristiwa lumpur Lapindo, dampak politis, ekonomi, sosial maupun lingkungan dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi masalah lumpur.

PT Lapindo Brantas merupakan salah satu perusahaan di bidang pertambangan yang berada di bawah naungan BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi) di Indonesia. Perusahaan ini mulai beroperasi semenjak tahun 1999 di wilayah Porong Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Letak

geografis Sidoarjo yang sangat strategis dalam bidang industri, membuat perusahaan pertambangan ini melakukan eksplorasi dan eksploitasi gas bumi di Sidoarjo. Potensi alam yang dimiliki Sidoarjo juga mendukung adanya perkembangan industri di bidang pertambangan. Sahana terbesar PT Lapindo Brantas dimiliki oleh keluarga tokoh politik terkenal, yaitu Grup Bakrie.

Kejayaan yang dimiliki oleh PT Lapindo Brantas memudar setelah terjadinya peristiwa semburan lumpur panas pada 29 Mei 2006. Semburan lumpur tersebut berasal dari aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh operator Lapindo. Kesalahan tersebut terletak pada prosedur pengeboran yang sudah ditetapkan oleh BP Migas. Pihak Lapindo yang bekerjasama dengan perusahaan kontraktor dari PT Medici Citra Nusa (MCN) melakukan kelalaian karena tidak melakukan pemasangan casing pada saat pengeboran. Akibat kesalahan tersebut, semburan lumpur panas di Sidoarjo lebih dikenal dengan "Lumpur Lapindo". Meskipun pihak PT Lapindo Brantas menyanggah tuduhan bahwa telah melakukan kesalahan dalam teknik prosedural pengeboran, tanggung jawab atas semua dampak yang ditimbulkan lumpur menjadi tanggung jawab pihak Lapindo.

Pertanggungjawaban memang harus dilakukan oleh PT Lapindo Brantas selaku pengebor mengingat bahwa dampak yang ditimbulkan sangat besar. Semburan lumpur yang setiap hari mengeluarkan volume lumpur sebesar 5.000 m³ masih belum bisa dihentikan. Lumpur terus meluap hingga menenggelamkan ribuan rumah, ratusan lahan, puluhan perusahaan dan fasilitas publik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Lapindo untuk mengatasi lumpur. Ilmuwan dan para ahli teknik dari dalam maupun luar negeri disatukan dalam forum-forum ilmiah untuk membahas penyebab dan upaya penanggulangan lumpur. Peristiwa lumpur Lapindo sangat menyita perhatian publik.

Peran media massa yang selalu memberitakan seputar peristiwa lumpur, membuat karir politik Aburizal Bakrie menurun. Aburizal Bakrie merupakan pemilik saham dari PT Lapindo Brantas dan tercatat menjadi orang terkaya di Asia pada tahun 2006. Selain sukses berbisnis, Ical juga terjun ke dunia politik. Pencalonannya sebagai ketua Partai Golkar tahun 2009 menjadi sorotan publik. Kontroversi terkait karir politik Aburizal Bakrie mulai merembet ke kasus lumpur Lapindo yang belum tuntas. Berbagai aksi demo yang dilakukan oleh korban lumpur terus menerus dilakukan.

⁴⁴ Fully Syafi, "Presiden Tagih Penyelesaian Kasus Lumpur Lapindo", dalam *Tempo*, 25 April 2011.

Korban lumpur menuntut penyelesaian ganti rugi diselesaikan sebelum Bakrie mencalonkan diri sebagai Ketua Partai Golkar ataupun sebagai Presiden RI pada 2014. Alotnya proses ganti rugi membuat warga melakukan berbagai aksi untuk menarik simpati masyarakat agar tidak mendukung Bakrie dalam karir politiknya.

Luapan lumpur Lapindo sudah jelas dan pasti merupakan sebuah peristiwa yang merusak sebagian infrastruktur ekonomi di Sidoarjo. Perlahan lumpur menenggelamkan kehidupan warga, tempat yang semula menjadi pemukiman tidak bisa ditinggali kembali. Dampak ekonomi tidak bisa dicegah, kerugian ditanggung oleh berbagai pihak, PT Lapindo Brantas, masyarakat dan pemerintah. meskipun pihak Lapindo yang ditunjuk sebagai penanggung jawab oleh pemerintah, tetapi PT Lapindo Brantas menyatakan tidak sanggup dan merasa kesulitan dalam mengatasinya. Ganti rugi yang harus diberikan kepada ribuan warga dan perusahaan korban lumpur mencapai puluhan triliun rupiah. Terendahnya infrastruktur jalan tol akibat luapan lumpur juga melumpuhkan aktivitas perekonomian Jawa Timur. Jalan penghubung utama dari Kota Surabaya ke kota lain menjadi terhambat, sehingga aktivitas ekonomi berjalan lambat.

Semburan lumpur yang tidak dapat dihentikan juga menimbulkan masalah sosial dalam pengungsian para korban lumpur. Kondisi pengungsian yang padat menyebabkan anak-anak menjadi mudah terpengaruh oleh perilaku orang dewasa yang kurang baik di pengungsian, misalnya berkata kasar. Kesehatan korban lumpur menjadi masalah sosial selanjutnya, lingkungan pengungsian yang kurang bersih dan ketersediaan makanan yang dianggap kurang layak mengakibatkan terganggunya kesehatan pengungsi terutama anak-anak. Komunitas warga yang sudah terbentuk kini bubar begitu saja, para korban lumpur yang tinggal di pengungsian maupun tempat lain banyak yang terpisah dari tetangganya dulu. Adaptasi di lingkungan baru harus dilakukan oleh para korban. Dalam waktu singkat, lumpur telah merubah tempat yang semula kawasan industri dan padat penduduk menjadi lautan lumpur yang tidak layak dihuni, dibudidaya dan untuk aktivitas lain.

Dampak luapan lumpur panas Lapindo mengakibatkan banyaknya lingkungan sekitar yang rusak. Persawahan, perkebunan, tambak, sungai dan sumur sebagai sumber air bersih telah tercemar. Lumpur yang mengandung gas bumi berjenis H₂S (Hidrogen Sulfida) mencemari sumur warga sekitar. Masyarakat yakin bahwa pencemaran sumur mereka akibat terjadiya semburan lumpur yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Warga takut menggunakan air sumurnya untuk keperluan sehari-hari. Luapan lumpur telah merusak

areal pertanian dan rawa serta ekosistem di dalamnya. Para petani gagal tanam dan panen akibat tercemar oleh lumpur. Lumpur yang bercampur minyak dan gas tidak menyuburkan tanaman petani. Bekicot, ikan, belut dan udang di rawa, sungai serta tambak mati mengambang.

Menanggapi dampak yang ditimbulkan oleh semburan lumpur Lapindo, akhirnya pemerintah membuat kebijakan melalui Surat Keputusan Presiden dan Surat Peraturan Presiden. Kebijakan dalam Keppres dan Perpres yang dibuat menyangkut masalah lumpur Lapindo sebanyak 8 surat putusan. Keppres dan Perpres tersebut berisikan tentang penetapan Timnas dan BPLS untuk menanggulangi masalah lumpur. Tugas-tugas Timnas dan BPLS meliputi, usaha menghentikan pusat semburan, menanggulangi luapan lumpur dan mengatasi dampak sosial yang ditimbulkan seperti proses evakuasi serta pembayaran ganti rugi kepada para korban.

Keputusan Presiden tersebut dinilai lebih menguntungkan pihak Lapindo, karena ganti rugi dilakukan secara bertahap sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung di pengadilan. Unsur politik dalam kasus lumpur Lapindo juga terlihat pada putusan MA yang menyatakan bahwa penyebab semburan karena bencana alam. Atas dasar keputusan tersebut, pemerintah kemudian menggunakan APBN untuk menanggulangi dampak lumpur kepada para korban. Putusan MA dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga didukung oleh anggota DPR bahwa penggunaan dana APBN dirasa diperlukan untuk menanggulangi dampak lumpur.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran-saran di antaranya sebagai berikut:

1. Penulis serta peneliti selanjutnya diharapkan dapat secara lebih detail dalam mengungkapkan kasus lumpur Lapindo, serta melengkapi hal-hal yang tidak tercantum pada makalah ini.
2. Perusahaan PT Lapindo Brantas maupun perusahaan pertambangan lainnya diharapkan melakukan perencanaan prosedural pengeboran yang matang sebelum melakukan pengeboran. Sehingga tidak lagi menimbulkan peristiwa serupa yang merugikan banyak pihak
3. Penelitian "Aspek Politis Lumpur Lapindo Sidoarjo Tahun 2006-2014" dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam mempelajari sejarah maupun ilmu sosial yang berkaitan dengan aktivitas industri pertambangan yang berpengaruh terhadap kondisi politik, ekonomi, sosial dan lingkungan sekitar.
4. Pemerintah diharapkan melakukan upaya penanganan dengan cepat dan tanggap ketika

terjadi sebuah peristiwa atau bencana yang merugikan masyarakat.

5. Lokasi lumpur Lapindo dijadikan sebagai tempat wisata bagi masyarakat umum, mengingat dampak yang ditimbulkan menyimpan berbagai kisah yang menarik untuk dilihat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Arsip

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007 tentang “Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo” yang ditetapkan pada 8 April 2007 di Jakarta.
- Surat Bupati Pasuruan kepada Kepala BPLS tentang Pemantauan dan Pembuangan Lumpur Sidoarjo ke Kali Porong.
- Surat Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2006 tentang “Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo” yang ditetapkan pada 8 September 2006 di Jakarta.
- Surat Pengaduan Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo kepada Ketua DPRD Jawa Timur pada 18 Maret 2007.

Sumber Koran :

- Detik. 29 November 2011.
- Jawa Pos. 30 Mei 2006.
- Jawa Pos. 14 Maret 2007.
- Jawa Pos. 10 Desember 2009.
- Kompas. 31 Mei 2006.
- Kompas. 07 Agustus 2009.
- Kompas. 24 Februari 2012.
- Kompas. 04 April 2013.
- Kompas. 06 Januari 2014.
- Radar Surabaya, 30 Mei 2006
- Republika. 09 Januari 2007.
- Republika. 26 Desember 2014.
- Tempo. 27 Juni 2006.
- Tempo. 08 Desember 2014.

Sumber Buku :

- Ali Azhar Akbar. 2007. *Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo*. Yogyakarta : Galangpress, 2007.
- Aminuddin Kasdi. 2011. “*Memahami Sejarah*”. Surabaya : Unesa University Press.
- Heru Sri Naryanto, Sutopo Nugroho, dkk, *Indonesia diantara Berkah dan Musibah*, (Jakarta : KNRT, 2009)
- Indra N. Fauzi. 2007. “*Dampak Lumpur Porong bagi Perekonomian Jawa Timur*”. Jakarta : REDI.
- Muhammad Mirdasy. 2007. “*Bernafas dalam Lumpur Lapindo*”. Surabaya : MIPP.

Nasir Tamara. 2004. “*Aburizal Bakrie : Bisnis Dan Pemikirannya*”. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Untung Sudarsono dan Indra Budi Sujarwo. 2008. *Aspek Geologi Teknik Lumpur Sidoarjo Jawa Timur*. Badan Geologi Nasional.

Sumber Hasil Penelitian :

- Arief Zuchrizal Madjid. 2011. *Analisis Daya Dukung Wilayah Pengembangan Industri Besar dan Sedang Kabupaten Sidoarjo*. Malang : Universitas Brawijaya.
- Bambang Catur Nusantara. 2011. *Membungkam Kebenaran dengan Lumpur Panas*. Yogyakarta.
- Cisilia Andriani. 2011. “*Dampak Sosial Bencana Lumpur Lapindo dan Penanganannya di Desa Renokenongo*”. Jawa Timur : UPN Veteran.
- Niniek Herawati. 2007. “*Analisis Risiko Lingkungan Aliran Air Lumpur Lapindo ke Badan Air*”. Semarang : Universitas Diponegoro.
- R. Wahyuni Triani. 2009. “*Local Policy Community Model untuk Merekonstruksi Mitigate Vulnerability dan Disaster Management Plan dalam Perspektif Sustainability Penanganan dan Penanggulangan Korban Lapindo*”. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Rubiandini R.S. 2006. “*Pembelajaran dari Erupsi Lumpur di Seitar Lokasi Sumur Banjarpanji-1*”. Jakarta : IAGI.
- Yuanita Maria W. 2013. “*Seluk Beluk Kasus Ledakan Lumpur Lapindo Brantas*”. Malang : Universitas Ma Chung.

Sumber Wawancara :

- Wawancara dengan Ibu Muawanah selaku korban lumpur Lapindo yang bekerja sebagai ojek di atas tanggul, pada 19 Maret 2016.
- Wawancara dengan Moch. Zaenal Abidin selaku korban lumpur Lapindo, pada 04 April 2016.